

PENDIDIKAN NASIONAL DAN TANTANGAN GLOBALISASI: Kajian kritis terhadap pemikiran A. Malik Fajar

Rusniati

Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
rusni.ati@gmail.com

Abstract

The globalization era which is full of challenges couldnot be avoided. Therefore, the educational institutions, especially islamic education, should be able to answer those challenges in order to change the direction of educational orientation. One of figures who is serious in building educational thinking paradigm is A. Malik Fadjar. This study aims to explore his educational thinking paradigm and educational concept proposed. A. Malik Fadjar faces the challenge of global era. The result of study showed that his educational thinking paradigm is holistic; in which the education is humanists, liberative, integralistics, multicultural and futuristic, either in the aspect of vision and mision, institution, management, patterns of educational interaction, curriculum, and educator. To face global era, A Malik Fadjar states that there are three big challenges, they are to protect the result achieved, anticipate the global era, and do some changes and adjustment of the national education system.

Keywords: Globalization; Islamic education; Holistic paradigm

Abstrak

Era globalisasi yang penuh dengan tantangan merupakan masa yang tidak terhindarkan. Untuk itu lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan tersebut dengan merubah arah dan orientasi pendidikan. Salah satu tokoh yang serius dalam membangun paradigma pemikiran tersebut adalah A. Malik Fadjar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat paradigma pemikiran pendidikan dan mengetahui konsep pendidikan yang ditawarkan A. Malik Fadjar dalam menghadapi tantangan era global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma pemikiran pendidikan A. Malik Fadjar, bersifat holistik; yaitu pendidikan yang humanis, liberatif, integralistik, multikultural dan futuristik, baik pada aspek visi-misi, kelembagaan, manajemen, pola interaksi pendidikan, kurikulum dan pendidik. Dalam menghadapi era globalisasi menurut A. Malik Fadjar, terdapat tiga tantangan besar yaitu mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, mengantisipasi era global, dan melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci: Globalisasi; Pendidikan Islam; Paradigma holistik

PENDAHULUAN

Diskusi mengenai fenomena kemanusiaan dan pemanusiaan tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan pendidikan, baik dalam makna pendidikan formal, pendidikan non-formal, maupun pendidikan informal. Definisi paling umum tentang pendidikan adalah proses pemanusiaan menuju lahirnya insan bernilai secara kemanusiaan.¹

Dari sudut pandang sosiologi, pendidikan selain berperan menyiapkan manusia untuk memasuki masa depan, juga memiliki hubungan dengan transformasi sosial, begitu juga sebaliknya. Berbagai pola sistem pendidikan menggambarkan corak, tradisi, budaya sosial masyarakat yang ada. Maka yang penting diperhatikan adalah bahwa suatu sistem pendidikan dibangun guna melaksanakan “amanah masyarakat” yaitu untuk menyalurkan anggota-anggotanya ke posisi tertentu.²

Namun saat ini arus globalisasi yang telah merambah ke seluruh aspek kehidupan adalah hal tak terhindarkan. Bahkan bersama globalisasi, kosmopolitanisme, dianut sebagai semacam “ideologi” dan multikulturalisme semakin menjadi visi hidup ber peradaban. Kenyataan ini mengharuskan adanya strategi-strategi kependidikan melalui pranata-pranata yang dikandungnya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan peradaban global. Arah perubahan ini mengacu kepada hal-hal yang bersifat imperatif³ maupun empirik.⁴

¹Sudarwan Danim, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 4. Manusia perlu dibantu agar ia berhasil menjadi manusia seseorang dapat dikatakan telah berhasil menjadi manusia bila telah memiliki nilai (sifat) kemanusiaan, itu menunjukkan bahwa tidaklah mudah jadi manusia. Karena itu sejak dahulu banyak manusia yang gagal menjadi manusia. Jadi, tujuan pendidikan ialah me-manusia-kan manusia. Agar tujuan itu dapat dicapai dan agar program dapat disusun maka ciri-ciri manusia yang telah menjadi manusia itu harus jelas. Lihat Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Ruhani da Qalbu, Memanusiakan Manusia*, Cet. Ke-I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 32; Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hal.19.

²Amanah masyarakat dimaksudkan; suatu sistem pendidikan bagaimanapun harus mampu menjadikan dirinya sebagai mekanisme alokasi posisional bagi sivitas akademi untuk menghadapi masa depan. A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005, h.vi.

³Secara imperatif, pranata sosial pendidikan dan pelatihan (diklat), khususnya sekolah dan perguruan tinggi, tidak hanya bertugas memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di masyarakat. Sebab mengelola pendidikan pada hakikatnya adalah mengelola masa depan. Malik Fajar, *Holistika ...*, hal. 67

⁴Secara empirik, diakui atau tidak, dunia pendidikan kita yang dipresentasikan dengan pola-pola pelatihan dan pendidikan untuk menjawab perubahan-perubahan global masih terasa lamban. Padahal secara imperatif dan empirik era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi. Perubahan-perubahan yang berlangsung cepat mulai kelihatan dampaknya. Menjawab

Dalam konteks ini, mau tidak mau, pranata pendidikan nasional harus melibatkan diri dalam pergumulan sosial, budaya, politik dan ekonomi secara umum. Hal ini penting supaya dunia pendidikan tidak mandul dan gamang dalam mengantisipasi era globalisasi yang mendera seluruh aspek kehidupan manusia dewasa ini.

Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pendidikan di Indonesia masih banyak menggunakan cara-cara konvensional dan lebih menekankan pengembangan kecerdasan dalam arti yang sempit dan kurang memberi perhatian kepada pengembangan bakat kreatif peserta didik. Padahal kreativitas di samping bermanfaat untuk pengembangan diri anak didik juga merupakan kebutuhan akan perwujudan diri sebagai salah satu kebutuhan paling tinggi bagi manusia.

Banyak usaha telah dilakukan oleh para pemikir, praktisi dan pelaku pendidikan untuk mengkonstruksinya sebagai amunisi memasuki masa depan. Dalam konteks ini kiranya nama A. Malik Fadjar bisa dinyatakan sebagai salah seorang pakar dan sekaligus praktisi pendidikan di negeri ini, gagasan-gagasannya dan kebijakan-kebijakannya selalu mendapat respon positif bagi kemajuan pendidikan. Intelektualitas dan kapabilitasnya di bidang pendidikan bisa dilihat dari sejarah hidup yang diabdikannya pada lembaga-lembaga pendidikan yang dipimpinya sehingga mencapai kualifikasi *academic excellence* dan *competitive advantage* di era global.

Di antara pemikiran A. Malik Fadjar yang menarik adalah bahwa ia mengatakan,

Saat ini lembaga-lembaga pendidikan Islam harus mendisain model-model pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan sekarang ini. Muncul pertanyaan model-model pendidikan Islam yang bagaimana? Yang diharapkan dapat menghadapi dan menjawab tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik sosial maupun kultural menuju masyarakat Indonesia baru... pendidikan Islam adalah pendidikan yang

perubahan global baik secara imperatif dan empirik menyarankan penyelesaian baik di tingkat wacana, maupun aksi kebijakan. Malik Fadjar, *Holistika...*, hal. 67

idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya kuat.⁵

Dengan kata lain, pendidikan yang diinginkan Malik Fajar adalah pendidikan yang tidak memisahkan intelektualitas dan spritualitas. Pendidikan juga pada dasarnya memberi kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Di sisi lain ia juga menekankan bahwa pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan fisik manusia. Poin pemikiran penting yang ditegaskan Malik Fajar adalah bahwa pendidikan harus mengacu kepada nilai-nilai luhur dan budaya sebuah bangsa.

Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, pemikiran Malik Fajar dalam pendidikan tentu menarik untuk dikaji. Dia adalah satu-satunya orang yang pernah mengurus pendidikan pada dua instansi yang berbeda yaitu ketika menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1998-1999, selanjutnya menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2001-2004.

Sebagai sosok yang bergelut di dunia pendidikan Indonesia, tentunya ia mengetahui akar persoalan pendidikan di negeri ini. Selama menjadi menteri, khususnya Menteri Pendidikan Nasional, banyak terobosan di bidang pendidikan yang telah digebraknya dalam rangka membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih maju. Menurut jenisnya penelitian berikut termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁶ Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan filosofis dan historis.⁷

PEMBAHASAN

Pendidikan Nasional di Era Global

Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang berlangsung begitu cepat dan

⁵ A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 37. Pendidikan integralistik mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Tuhan, manusia dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial. Lihat A. Malik Fajar, "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995.

⁶ Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literatur-literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 1984, hal. 136.

⁷ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hal. 122; Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, hal. 90

munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi. Pendidikan mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan.⁸

Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain: *pertama*, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. *Kedua*, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. *Ketiga*, hasil-hasil survey internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. *Keempat*, masalah rendahnya tingkat *social-capital*. Inti dari *social capital* adalah *trust* (sikap amanah).⁹

Berbagai tantangan tersebut di atas menuntut kita untuk segera melakukan *hijrah*, atau meninggalkan satu keadaan yang didorong oleh karena ketidaksenangan terhadap keadaan itu, menuju ke keadaan lain guna meraih yang baik atau lebih baik. Persoalannya adalah bagaimana kita harus berhijrah, dalam arti mengubah strategi pengembangan pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas.

Era persaingan global dan pusaran neo-liberalisme tidak bisa dibendung lagi dan melanda dunia pendidikan. Di jenjang pendidikan tinggi, mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia melakukan aksi menentang biaya tinggi pendidikan tinggi. Otonomi pendidikan tinggi membawa implikasi hak dan kewajiban perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengatur pengelolaannya sendiri termasuk mencari sumber-sumber pendapatan untuk menghidupi diri. Konsekuensi logis dari otonomi kampus, saat ini perguruan tinggi seakan berlomba membuka program baru atau menjalankan strategi penjangkaran mahasiswa baru untuk mendatangkan dana.¹⁰

⁸ Muhammad Said dan Juminar Affan, *Mendidik dari Zaman Ke Zaman*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987, hal. 45

⁹ <http://edu-articles.com/menggugah-perspektif-masyarakat-terhadap-paradigma-baru-sistem-pendidikan-nasional/>

¹⁰ http://www.infogoe.com/viewstory/2009/09/17/strategi_pendidikan_di_era_otonomi_dan_persaingan_global/?url=http://matematikadw.wordpress.com/2009/09/16/persoalan-pendidikan/

Perdebatan antara anti-otonomi dan pro-otonomi perguruan tinggi tidak akan berkesudahan dan mencapai titik temu. Kelompok yang menentang otonomi perguruan tinggi berpandangan negara harus bertanggung jawab atas pendidikan dan menanggung pembiayaan perguruan tinggi negeri. Mereka mengkhawatirkan privatisasi perguruan tinggi akan menutup akses bagi calon mahasiswa dari kalangan tidak mampu dan fenomena komersialisasi ini justru akan menurunkan komitmen dan mutu pendidikan tinggi.

Ralitas pendidikan tinggi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari gerakan neo-liberalisme yang menjelma dalam kebijakan pasar bebas dan mendorong pemerintah untuk melakukan privatisasi berbagai aset pemerintah.¹¹ Sementara itu, kebijakan privatisasi pendidikan tinggi ini nampaknya akan terus dijalankan. Dua alasan yang sering dikemukakan adalah ketidak-mampuan pemerintah membiayai pendidikan tinggi dan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi negeri. Namun tanpa perhitungan kuota yang tepat dan sistem penunjang aksesibilitas, elitisme dalam pendidikan tinggi akan mengancam proses demokratisasi di Indonesia. Pendidikan yang diharapkan menjadi jembatan bagi pemerolehan akses ekonomi, politik, hukum, dan budaya secara lebih merata menjadi roboh.

Holistika Pemikiran Pendidikan Malik Fajar

Dalam kaitannya dengan makna dan hakikat pendidikan, khususnya pendidikan Islam, Malik Fajar menyatakan bahwa pendidikan Islam mempunyai pengertian: *pertama*, jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraan didorong oleh hasrat dan semangat cita-cita untuk mengejawantahkan nilai-nilai Islam baik yang tercermin dalam nama lembaga maupun dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya. Di sisi lain, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang akan diwujudkan dalam seluruh kegiatan pendidikannya. *Kedua*, jenis pendidikan yang memberikan perhatian dan sekaligus menjadikan ajaran Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini, kata Islam ditempatkan sebagai bidang studi, sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu yang lain. *Ketiga*, jenis pendidikan yang mencakup kedua pengertian itu. Di

¹¹ Nugroho, Heru (Ed.) *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi*. Center for Critical Social Studies (Jakarta: Kanisius, 2002, hal. 54

sini, kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai, juga sebagai bidang studi yang ditawarkan lewat program studi.¹²

Dalam merumuskan hakikat pendidikan, Malik Fadjar menawarkan pendidikan idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat. Adapun pendidikan idealistik ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan integralistik; yakni mengandung komponen-komponen kehidupan yang meliputi: Tuhan, manusia dan alam pada umumnya sebagai suatu yang integral bagi terwujudnya kehidupan yang baik, serta pendidikan yang menganggap manusia sebagai sebuah pribadi jasmani-rohani, intelektual, perasaan dan individu-sosial. Pendidikan yang integralistik diharapkan bisa menghasilkan manusia yang memiliki integritas tinggi, yang bisa bersyukur dan menyatu dengan kehendak Tuhannya, yang bisa menyatu dengan dirinya sendiri (agar tidak memiliki kepribadian belah), menyatu dengan masyarakatnya (agar bisa menghilangkan disintegrasi sosial), dan bisa menyatu dengan alam (agar tidak berbuat kerusakan).
2. Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia; yakni makhluk ciptaan Tuhan dengan fitrah tertentu. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidup. Sebagai makhluk batas antara hewan dan malaikat ia menghargai hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berlaku dan diperlakukan dengan adil, hak menyuarakan kebenaran, hak untuk berbuat kasih sayang dan lain sebagainya. Pendidikan yang humanistik diharapkan dapat mengembalikan hati manusia kepada fitrahnya sebagai sebaik-baik makhluk, *khayr ummah*. Manusia “yang manusiawi” yang dihasilkan oleh pendidikan humanistik diharapkan bisa berfikir, merasa dan berkemauan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang bisa mengganti sifat individualistik, egoistik, egosentrik dengan sifat kasih sayang kepada sesama manusia, sifat ingin memberi dan menerima, sifat saling menolong, sifat ingin mencari kesamaan dan lain sebagainya.

¹² A. Malik Fadjar, “Pengembangan Pendidikan Islam”, dalam Nafis (Ed), *Konstekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995) hal. 507

3. Pendidikan pragmatik; adalah pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang selalu membutuhkan sesuatu untuk melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, baik bersifat jasmani, seperti pangan, sandang, papan, sek, kendaran dan sebagainya maupun bersifat rohani, seperti berfikir, merasa, aktualisasi diri, kasih sayang dan keadilan maupun kebutuhan sukmawi seperti dorongan untuk berhubungan dengan *Adikodrati*. Pendidikan pragmatik diharapkan dapat mencetak manusia pragmatik yang sadar akan kebutuhan-kebutuhan hidupnya, peka terhadap masalah-masalah kemanusiaan dan dapat membedakan manusia dari kondisi dan situasi yang tidak manusiawi.
4. Pendidikan yang berakar kuat, yakni pendidikan yang tidak meninggalkan akar-akar sejarah, baik sejarah kemanusiaan pada umumnya maupun sejarah kebudayaan suatu bangsa atau kelompok etnis tertentu. Pendidikan yang berakar budaya kuat diharapkan dapat membentuk manusia yang mempunyai kepribadian, harga diri, percaya pada diri sendiri dan membangun peradaban berdasarkan budayanya sendiri yang merupakan warisan monumental dari nenek moyangnya. Tapi bukan orang yang anti kemodernan, yang menolak begitu saja transformasi budaya dari luar.¹³

Jika dirumuskan, maka proses pembentukan manusia seutuhnya (*insan kāmīl*), akan diwujudkan melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sains, teknologi dan penanaman nilai-nilai kemanusiaan (*fitrah*) untuk membebaskan manusia dari belenggu kehidupan serta mendapatkan pemahaman hakiki tentang fenomena atau misteri di balik kehidupan nyata, guna memperoleh kebahagiaan yang abadi di sisi Allah.¹⁴ Itulah pendidikan yang bermakna secara horizontal sekaligus vertikal yang akan menghasilkan manusia berkualitas iman kepada Allah, komitmen dengan ilmu pengetahuan serta senantiasa beramal shaleh.

¹³ A. Malik Fajar, "Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, *tidak diterbitkan*), hal. 7-9.

¹⁴ Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan *fitrah* manusia serta sumber daya insan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (*insan kāmīl*) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Lihat. Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya media, 1992, hal. 14.

Keseluruhan aspek yang tercakup dalam konfigurasi kesatuan iman, ilmu dan amal shaleh merupakan takaran bagi pembentukan kerangka ideal manusia yang bertakwa kepada Allah, cerdas dan kreatif yakni manusia yang berdaya cipta, bercita rasa dan berjiwa karsa. Di dalam dirinya terdapat keseimbangan dalam tiga aspek yaitu kognitif, efektif dan psikomotorik yang diperlukan untuk memainkan peran pada zamannya. Itulah *blue print* manusia masa depan yang memiliki kualitas dzikir, fikir dan amal shaleh sekaligus.¹⁵ Di sisi lain, menurut Malik Fadjar, sebenarnya esensi dari pendidikan itu sendiri adalah transmisi kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide, etika dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa.¹⁶

Malik Fadjar juga mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan hidup (*a necessity of life*), sebagai bimbingan (*a direction*), sebagai sarana pertumbuhan (*a growth*), yang mempersiapkan dan membukakan serta membentuk disiplin hidup. Pendidikan mengandung misi keseluruhan aspek kebutuhan hidup serta perubahan-perubahan terjadi.¹⁷

Ada beberapa hal strategis yang bisa diperankan pendidikan dalam meresolusi konflik dan kekerasan dunia, yaitu: a) Pendidikan mengambil strategi konservasi b) Pendidikan mengambil strategi restorasi. Harus diakui bahwa peran peran dan tanggung jawab guru dalam proses pendidikan berkualitas bukanlah ringan. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam, dimana aspek semua kependidikan dalam Islam terkait dalam nilai-nilai, yang melihat guru bukan saja pada penguasaan materi pembelajaran, tapi juga pada investasi nilai-nilai moral dan spiritual yang diembankan kepadanya untuk ditransformasikan kepada anak didik. Di sini peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sekaligus sebagai pembimbing, pengajar, pelatih dan pencipta perilaku anak didik. Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik harus menjadi fokus utama pendidik yang dibidik oleh guru. Tiga aspek ini menjadi bidikan utama guru dalam mentransformasikan ilmu dan nilai yang terkandung di dalamnya.¹⁸

¹⁵ Malik Fadjar, *Pengembangan Pendidikan Islam...*, hal. 10.

¹⁶ A. Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: LP3NI, 1998, hal. 54.

¹⁷ Malik, *Visi Pembaharuan ...*, hal. 54

¹⁸ Malik Fadjar, *Holistika...*, hal. 87

Dari cuplikan pemikirannya tentang hakikat pendidikan, terlihat bahwa Malik Fajar menginginkan pendidikan yang dari satu sisi harus esensial, namun dari sisi lain harus progresif. Artinya, pendidikan harus futuristik (memandang jauh ke depan), akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai esensi budaya sebagai warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Malik Fajar menyebutnya pendidikan yang berakar kuat pada nilai sejarah masa lalu.

Jadi hakikat dan nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat pada pendidikan Islam yang berorientasi ke depan dan menoleh kepada masa lalu, sebab bagaimanapun progresifnya visi pendidikan maka dia tidak akan pernah lepas dari masa lalu yang digunakan sebagai dasar manusia untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu pengabdian.

Peran, Manajemen dan Relasi Lembaga Pendidikan Islam

Dalam tradisi keilmuan pendidikan terdapat kesepakatan bahwa lembaga pendidikan terdiri dari berbagai bentuk. Kadang kategori pendidikan formal, informal dan non formal dipakai untuk membagi lembaga pendidikan dari segi administrasi penyelenggaraannya. Di sisi lain, dari proses pembelajarannya, kadang-kadang lembaga pendidikan dikelompokkan kepada pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dalam hal ini perbedaan pengelompokan ini mungkin hanya terletak pada penyelenggara dan sistemnya saja.¹⁹

Secara struktural ada dua pengelola pendidikan di Indonesia. *pertama* Dinas Pendidikan dan kebudayaan *kedua* Kementerian Agama. Pertama pengelola bagi lembaga pendidikan umum dari pendidikan dasar sampai pada perguruan tinggi. Kedua pengelola bagi lembaga pendidikan agama dari tingkat dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Jadi secara struktural pendidikan Islam secara umum berada di bawah payung Kementerian Agama.

Dalam buku *Holistika Pemikiran Pendidikan*, dikatakan bahwa perguruan tinggi dan pesantren adalah dua sisi pendidikan yang mempunyai banyak perbedaan. Perguruan Tinggi (PT) merupakan gejala kota, sedangkan pesantren merupakan gejala desa. PT identik dengan kemoderenan sedangkan pesantren identik dengan ketradisional. PT lebih menekankan pendekatan yang bersifat

¹⁹ Abdullah Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, cet. Ke-2, Jakarta: Rafika Aditama, 2009, hal. 19

liberal dan pesantren lebih menekankan sikap konservatif yang berstandar dan berpusat pada figur sang kiai.²⁰

Belakangan ini kita menyaksikan terjadinya sintesis atau konvergensi antara pesantren dan perguruan tinggi, maka hal itu dapat dipandang sebagai perkembangan yang konstruktif. Seperti kita ketahui, belakangan ini banyak pesantren yang mendirikan perguruan tinggi dan sebaliknya perguruan tinggi yang mendirikan pesantren.

Jika demikian masalahnya, maka sintesis antara perguruan tinggi dan pesantren menghadapi persoalan yang cukup serius karena kedua institusi tersebut sudah terlanjur dikembangkan dalam wacana keilmuan yang dualisme dan dikotomis. Namun masalah tersebut dapat segera dituntaskan jika ada keberanian moral dan intelektual dari semua pihak yang berkepentingan untuk menggagas sintesis antara perguruan tinggi dan pesantren dalam kerangka kesatuan ilmu tadi.

Dalam sejarah pendidikan Indonesia maupun dalam studi pendidikan, sebutan Pendidikan Islam umumnya dipahami sebagai ciri khas jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan. Demikian pula batasan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003.

Oleh karena itu kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh.

Menyoroti lembaga pendidikan Islam, menurut Malik Fadjar, *Pertama*, lembaga pendidikan Islam itu pendirian dan penyelenggaraannya didorong oleh hasrat mengejawantahkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam nama lembaga pendidikan itu dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. *Kedua*, lembaga pendidikan yang memberikan perhatian dan menyelenggarakan kajian tentang Islam yang tercermin dalam program kajian sebagai ilmu dan diperlakukan seperti ilmu-ilmu lain yang menjadi program kajian lembaga pendidikan ilmu yang bersangkutan.²¹

²⁰ Malik, *Holistika...*, hal. 98

²¹ Lihat A. Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam* cet. I, Jakarta Timur: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1991, hal. 31.

Madrasah²² sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya.²³ Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Kesenjangan antara madrasah swasta dan madrasah negeri pun tampaknya juga menjadi masalah yang belum tuntas diselesaikan. Gap tersebut meliputi beberapa hal seperti pandangan guru, sarana dan prasarana, kualitas input siswa dan sebagainya yang kesemuanya itu berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada mutu pendidikan. Hal ini karena munculnya SKB tiga menteri tersebut belum diimbangi penyediaan guru, buku-buku dan peralatan lain dari departemen terkait.²⁴

Malik Fajar dalam salah satu pikirannya, bahwa dalam memimpin lembaga pendidikan Islam itu, kalau kita ingin menatap masa depan pendidikan Islam yang mampu memainkan peran strategis dan memperhitungkan untuk dijadikan pilihan, maka perlu ada keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan masalah-masalahnya secara mendasar dan menyeluruh, seperti yang berkaitan dengan hal-hal yaitu: *Pertama*, kejelasan antara yang dicita-citakan dengan langkah operasionalnya. *Kedua*, pemberdayaan (*empowering*) kelembagaan yang ada dengan menata kembali sistemnya. *Ketiga*, perbaikan, pembaharuan dan pengembangan dalam sistem pengelolaan atau manajemen. *Keempat*, peningkatan SDM yang diperlukan.²⁵

²² Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata *madrasah* memiliki arti sekolah kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*. Lihat A. Malik Fajar, *Visi Pembaruan...*, hal. 111.

²³ Malik Fajar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, cet. ke-I, Bandung: Mizan, 1999, hal. 20.

²⁴ Malik Fajar, *Madrasah...*, hal. 76.

²⁵ Malik Fajar, *Madrasah...*, hal. 46.

Pikiran di atas memberi petunjuk bahwa dalam mengelola lembaga pendidikan Islam harus ditempuh empat langkah seperti di atas. Seorang pimpinan harus terlebih dahulu merumuskan dan memahami secara seksama apa cita-cita dan tujuan lembaga itu didirikan, artinya harus dengan jelas memberi jawaban terhadap pertanyaan tentang apa/semacam apa yang akan diproduksi dari lembaga itu. Dengan jelasnya jawaban terhadap pertanyaan ini, maka akan dapat terpenuhi hajat sosial yang lebih fungsional, artinya lembaga dan program yang dilakukan benar-benar menjadi kebutuhan hidup manusia, baik ia secara akademis, personal maupun profesional/fungsional.

Tidak seperti perubahan-perubahan besar yang pernah melanda peradaban manusia di masa lalu yang berlangsung secara evolusioner, dinamika masyarakat memasuki milenium ketiga saat ini berlangsung dalam waktu yang relatif sangat cepat dan kompleksitas yang lebih tinggi. Seperti intitusi dan anggota masyarakat lain, pendidikan tinggi pada umumnya harus senantiasa menilai dan menata diri menghadapi pergeseran pranata sosial yang semakin rumit. Antara lain diuraikan beberapa poin penting mengenai pergeseran konteks pembangunan nasional, rekonstruksi peran sektor pendidikan tinggi untuk menunjang pembangunan nasional dan agenda aksi pembinaan pendidikan tinggi.²⁶

Ada empat hal yang harus dilihat dalam gerak pendidikan, yaitu pertumbuhan (*growth*), perubahan (*change*), pengembangan (*development*), dan berkelanjutan (*sustainability*). Sistem pendidikan yang baik harus mampu mengembangkan sistem komunikasi antar semua unsur yang ada. Artinya sistem pendidikan yang tidak mampu melahirkan adanya iklim komunikatif berarti telah menciptakan suasana pendidikan yang lebih hidup dan manusiawi.

Mengembangkan dan melaksanakan pendidikan berdasarkan tuntutan global yang sekaligus memanfaatkan dan mendorong potensi daerah melalui era globalisasi dan otonomi daerah membutuhkan kesungguhan, koordinasi, visi dan misi masa depan. Kesadaran inilah kiranya yang melatarbelakangi dilakukannya rapat koordinasi pendidikan menengah kejuruan ini.

Hal lain yang perlu dikedepankan dalam keterbatasan kemampuan yang dimiliki adalah mendorong beberapa sekolah untuk menjadi rujukan bagi sekolah lainnya. Melalui rapat koordinasi ini dapat menyamakan visi, misi, dan tujuan

²⁶ Malik, *Holistika...*, hal. 133.

pendidikan kejuruan, khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan fungsi masing-masing dalam mengembangkan pendidikan kejuruan. Mengembangkan sekolah unggul melalui SMK bertaraf internasional dan nasional itu penting. Namun, tidak kalah penting adalah perhatian kita pada sekolah yang ada di daerah yang terpencil dan pinggiran kota yang pada umumnya masih tertinggal. Oleh karena itu, selain kita mengacu kearah penciptaan SMK unggulan adalah perlu dipikirkan pula keberpihakan kita pada yang lemah agar semua bisa sama dan dalam kebersamaan.²⁷

Reformasi Perguruan Tinggi

Kehadiran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) semakin penting dalam rangka membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meluruskan jalan hidupnya dalam menjalankan pembangunan fisik mental untuk masa kini dan masa datang. Sebab, maju mundurnya suatu bangsa saat ini sangat tergantung kepada kemampuan profesional warganya dalam mengelola dan mengolah Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Untuk memiliki kemampuan ini seseorang tidak cukup lagi dengan pendidikan menengah, apalagi dengan pendidikan rendah saja. Jika setiap orang ingin mencapai kemajuan harus menjamin dirinya dengan sebuah ijazah universitas. Ini berarti bahwa kekuatan-kekuatan dalam masyarakat akan semakin ditentukan oleh orang-orang yang telah dibentuk secara universitas dan bahwa masyarakat akan semakin lebih terpelajar. Konsekuensi logisnya, Perguruan Tinggi bukan lagi sebagai kebutuhan “mewah” bagi golongan elit melainkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat.²⁸

Harus segera dikemukakan, perumusan kembali (*reformulation*) paradigma baru Perguruan Tinggi pada tingkat nasional itu mendapatkan daya dorong dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, dan politik di Indonesia sejak akhir 1997. Krisis yang juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan pada seluruh jenjang tidak terelakkan pula mendorong berkembangnya perluasan konsep paradigma baru Perguruan Tinggi tadi, sehingga tercakup dalam konsep reformasi pendidikan nasional secara menyeluruh. Reformasi sistem pendidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aspek pendidikan, seperti: filosofi dan kebijakan pendidikan nasional; sistem pendidikan berbasis masyarakat (*community-based*

²⁷ Malik Fajar, *Holistika...*, hal. 266.

²⁸ Malik Fajar, *Visi Pembaharuan...*, hal. 137.

education); pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan; manajemen berbasis sekolah (*school-based management*); implementasi paradigma baru Perguruan Tinggi dan sistem pembiayaan pendidikan.²⁹

Salah satu karakteristik yang membedakan antara perubahan di masa lalu dan masa sekarang/mendatang adalah wilayah dan warna tantangan sekarang bersifat global. Tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara, bangsa, suku, etnis dan bahkan agama. Dinamika perubahan berjalan relatif lebih cepat dan kompleks karena saling keterkaitan antara faktor dan komponen yang menjadi sebab dan akibat dari suatu perubahan. Hal ini tentu saja memerlukan adaptasi yang kritis dan cepat, yang kadang-kadang tidak begitu mudah dilakukan oleh institusi-institusi sosial seperti sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu adanya transisi yang ditandai masih belum satunya visi dan penafsiran terhadap kebijakan otonomi daerah, sehingga dalam beberapa persolalan tertentu terasa sulit “menyatubahasakan” hak dan kewenangan daerah dengan kepentingan nasional.³⁰

Selain masalah dikotomi, menurut Malik Fadjar, kelemahan umat Islam dalam menyelenggarakan pendidikan Islam, faktor utamanya terletak pada dataran epistemologis, yaitu bagaimana mencairkan nilai-nilai Islam sebagai setting sosial kultural yang berkembang. Dengan kata lain, umat Islam masih menghadapi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu manusia yang memiliki etos, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Dalam rangka mewujudkan sistem nilai Islam pada bidang pendidikan menjadi sebuah sistem pendidikan yang dapat diandalkan, paling tidak ada dua cara. *Pertama*, meningkatkan kualitas berpikir dengan cara meningkatkan kecerdasan. *Kedua*, memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas kerja melalui peningkatan etos kerja.³¹

Gagasan Pendidikan Liberatif

Salah satu pandangan yang sangat populer adalah konsiensialisme yang dikumandangkan oleh ahli pikir pendidikan terkenal Paulo Freire, seorang Doktor

²⁹ Lihat, Santoso S. Hamidjojo et al., *Platform Reformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional, 1998), dan juga lihat, A. Malik Fadjar et. Al., *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999.

³⁰ Malik, *Holistika...*, hal. 127-129.

³¹ Malik Fajar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, cet. I, Jakarta: Fajar Dunia, 1999, hal. 35.

sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Recife, Brasil dan juga seorang praktisi pendidikan yang banyak menggagas pendidikan liberatif.³² Pendidikan yang dikumandangkan oleh Freire ini yang juga dikenal sebagai pendidikan pembebasan pendidikan adalah proses pembebasan. Konsensialisme yang dikumandangkan Freire merupakan suatu pandangan pendidikan yang sangat mempunyai kadar politis karena dihubungkan dengan situasi kehidupan politik terutama di negara-negara Amerika Latin. Paulo Freire di dalam pendidikan pembebasan melihat fungsi atau hakikat pendidikan sebagai pembebasan manusia dari berbagai penindasan. Sekolah adalah lembaga sosial yang pada umumnya mempresentasi kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada agar menjaga status quo hukum membebaskan manusia dari tirani kekuasaan. Status quo atau di dalam istilah Freire “kapitalisme yang licik”. Sekolah harus berfungsi membangkitkan kesadaran bahwa manusia adalah bebas.

Merespon tantangan perubahan tersebut, maka menurut Malik Fadjar, pendidikan harus dikelola menurut manajemen modern dan futuristik sebagai usaha yang mengantarkan peserta didik ke posisi-posisi tertentu di masa depan. Yaitu, suatu manajemen yang berpretensi membangun manusia professional intelektual dan berketerampilan dalam hal kemampuan bergaul di tengah-tengah komunitas global secara dinamis, kreatif dan inovatif.³³

Pengembangan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani

Merujuk pada Malik Fadjar, masyarakat madani yang ingin diwujudkan di Indonesia memiliki beberapa ciri. *Pertama*, masyarakat yang religius, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. *Kedua*, demokratis pluralistik yang menghargai perbedaan pendapat, keanekaragaman suku, ras, agama dan kebudayaan. *Ketiga*, tertib dan menjunjung tinggi hukum sebagai aturan tertinggi yang mengikat kehidupan bermasyarakat. *Keempat*, mengakui dan menjunjung tinggi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), egalitarianisme, dan tidak diskriminatif. *Kelima*, profesional dan *skillfull*; memiliki keunggulan intelektual,

³² A. Malik Fajar. ‘Kata Pengantar: Kembali Ke Jiwa Pendidikan, Memperkokoh Wacana Humanisasi Pendidikan Islam’, dalam Imam Tholikhah dan Ahmad Barizi. *Membuka Jendela ...*, hal. 1-2.

³³ Malik Fadjar. *Kata Pengantar...*, hal. IX.

ketrampilan dan profesionalisme dalam persaingan global. *Keenam*, masyarakat yang terbuka dan memiliki tradisi belajar.³⁴

Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip oleh Hendro Prasetyo, masyarakat madani mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan berperadaban (*civility*), sivilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu untuk menerima berbagai pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Ini berarti, tidak ada satu pihak manapun, termasuk pemerintah yang memaksakan kehendak dan kemauannya sendiri.³⁵

Pengembangan pendidikan Islam, dengan demikian diharapkan agar mampu menciptakan *ukhuwwah islāmiyyah* dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekedar persaudaraan antar umat Islam sebagaimana yang selama ini dipahami, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antar sesama. Menurut Islam, semua agama harus dilindungi, dan para pemeluknya harus diberi kebebasan untuk melaksanakan agamanya. Hanya saja konsep kebebasan beragama ini lebih mencerminkan pandangan hidup, perilaku dan mentalitas. Karena itu, perlu dikembangkan dialog antar umat beragama yang lebih mencerminkan sikap, perilaku dan mentalitas. Posisi pendidikan Islam yang sudah jelas tersebut perlu dikembangkan ke arah: (1) pendidikan Islam multikulturalis, yakni pendidikan Islam perlu dikemas dalam watak multikultural, ramah menyapa perbedaan budaya, sosial dan agama; (2) mempertegas misi *liutammima makarimal akhlaq*; dan (3) spiritualisasi watak kebangsaan, termasuk spiritualisasi berbagai aturan hidup untuk membangun bangsa yang beradab.³⁶

Masyarakat modern dewasa ini yang ditandai dengan munculnya pasca industri (*postindustrial society*) atau masyarakat informasi (*information society*) sebagai tahapan ketiga dari perkembangan peradaban, tak pelak lagi telah menjadikan kehidupan manusia secara teknologi memperoleh banyak kemudahan. Tetapi juga masyarakat modern menjumpai banyak paradoks dalam kehidupannya. Dalam bidang revolusi informasi, seperti dikemukakan Donald Michael,

³⁴ Malik Fadjar, *Visi Pembaharuan...*, hal. 76.

³⁵ Hendro Prasetyo, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*, cet ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 174.

³⁶ A. Malik Fadjar, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. Makalah Disampaikan sebagai Keynote Address dalam Seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The IIUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.

sebagaimana dikutip oleh Malik Fajar juga terjadi ironi besar. Semakin banyak informasi dan semakin banyak pengetahuan mestinya makin besar kemampuan melakukan pengendalian umum. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak informasi telah menyebabkan semakin disadari bahwa segala sesuatunya tidak terkendali. Karena itu dengan ekstrem Ziauddin Sardar, sebagaimana dikutip oleh Malik Fajar menyatakan bahwa abad informasi ternyata sama sekali bukan rahmat. Di masyarakat Barat, ia telah menimbulkan sejumlah besar persoalan, yang tidak ada pemecahannya kecuali cara pemecahan yang tumpul. Di lingkungan masyarakat kita sendiri misalnya, telah terjadi swastanisasi televisi, masyarakat mulai merasakan eksese negatifnya.³⁷

Analisis

Sebagai seorang yang berlatar belakang guru, Pemikiran A. Malik Fajar dalam pendidikan menarik untuk dikaji, beliau adalah satu-satunya orang yang pernah mengurus pendidikan pada dua instansi yang berbeda yaitu ketika menjabat sebagai Menteri Agama pada tahun 1998-1999. Selanjutnya ia menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2001-2004 dan menjadi Menkokesra *ad Interim* pada April sampai Nopember 2004.

Bergelut di dunia pendidikan Indonesia, tentunya ia mengetahui akar persoalan pendidikan di negeri ini, selama menjadi menteri, khususnya Menteri Pendidikan Nasional, banyak terobosan di bidang pendidikan yang telah digaungkannya dalam rangka membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih maju.

Memperhatikan apa yang disampaikan Malik Fajar dalam holistika pemikiran pendidikan, dapat diambil beberapa point penting. Menurutnya pendidikan nasional harus mempunyai visi dan misi. Visi misi itu bertumpu pada kenyataan kehidupan berbangsa di negara Indonesia, artinya semua aspek harus menjadi pertimbangan dalam merancang visi pendidikan nasional. Visi pendidikan hanya akan mampu menjawab tantangan apabila mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan khazanah dan warisan budaya bangsa.

Demikian halnya, dalam merancang visi dan misi pendidikan nasional, suasana yang diliputi konflik yang terjadi harus menjadi pertimbangan.

³⁷ A.Malik Fajar, Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah, Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21, IAIN, Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995, hal. 3.

Maksudnya, arus pergeseran situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya sebuah bangsa harus menjadi pertimbangan yang matang. Jika tidak, visi pendidikan kemungkinan tidak akan mampu membawa bangsa kepada cita-cita ideal yang diharapkan. Demikian halnya dengan pembenahan di kala krisis dan memperhatikan di antara aneka persoalan bangsa serta peradaban dan kebudayaan juga harus menjadi tonggak utama dalam merumuskan visi dan misi pendidikan.

Selanjutnya, MBS sebagai realisasi dari desentralisasi pendidikan. Sedikitnya ada empat bentuk yang perlu diidentifikasi, antara lain: *pertama*, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan atau tanggung jawab administratif ke tingkat yang lebih rendah, *kedua*, Delegasi, yaitu pelimpahan atau pemindahan tanggung jawab manajerial dan fungsional ke organisasi di luar struktur birokrasi, *ketiga*, Devolusi, yaitu penguatan dan penciptaan unit pemerintah di daerah, dan *keempat*, Privatisasi atau swatanisasi, yaitu pemberian wewenang secara penuh kepada swasta untuk merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi seluruh sistem yang di kontruksi.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi daerah di bidang pendidikan, mengingat prinsip dan kecenderungan yang masih mengembalikan pengelolaan manajemen sekolah kepada pihak-pihak yang dianggap paling mengetahui kebutuhan sekolah.

Pada bagian ketiga, Malik Fadjar membahas masalah pendidikan dan pembangunan nasional dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada lima sub point yang ditekankan pada pembahasan ini yaitu bagaimana memahami Jati diri Bangsa melalui lensa pendidikan, bagaimana pendidikan sebagai praksis pembangunan bangsa, bagaimana pendidikan nasional, bahasa Indonesia dan kehidupan berbangsa, bagaimana kaitan ilmu dengan moral: upaya membangun moralitas dan sikap ilmiah bangsa, dan bagaimana peran serta universitas dalam pembangunan nasional.

Jati diri bangsa menurutnya, berkaitan erat dengan konsep dan desain pendidikan. Oleh sebab itu pendidikan menempati posisi penting dalam mengembangkan dan mempertahankan jati diri bangsa. Demikian juga dengan praksis pembangunan bangsa, bahwa pembangunan sebuah negara harus berjalan seiring dengan berkembangnya pendidikan.

Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi pendidikan, perlu dipertahankan dan diperkenalkan kepada negara lain sebagai upaya menunjukkan rasa

kebanggaan terhadap pendidikan nasional sekaligus menjadi simbol pendidikan Indonesia yang mampu memberikan penguatan nasionalisme bahasa dalam pendidikan.

Hemat penulis bahwa paradigma pendidikan yang beliau kembangkan adalah paradigma baru, orientasi pendidikan pada desentralistik, kebijakan pendidikan bersifat dari bawah ke atas, orientasi pengembangan pendidikan lebih bersifat, di mana pendidikan ditekankan pada pengembangan kesadaran untuk bersatu dalam kemajemukan budaya, kemajemukan berpikir, menjunjung tinggi nilai moral, kemanusiaan dan agama, kesadaran kreatif, produktif, dan kesadaran hukum. Meningkatnya peran serta masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif dalam upaya pengembangan pendidikan, pemberdayaan institusi masyarakat, seperti keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pesantren, dunia usaha, lembaga-lembaga kerja, dan pelatihan, dalam upaya pengelolaan dan pengembangan pendidikan, yang diorientasikan kepada terbentuknya masyarakat madani Indonesia.

Berdasarkan pandangan ini, pendidikan sudah harus diupayakan untuk mengalihkan paradigma yang berorientasi ke masa lalu (abad pertengahan) ke paradigma yang berorientasi ke masa depan, yaitu mengalihkan dari paradigma pendidikan yang hanya mengawetkan kemajuan, ke paradigma pendidikan yang merintis kemajuan. Mengalihkan paradigma dari yang berwatak *feodal* ke paradigma pendidikan yang berjiwa demokratis. Mengalihkan paradigma dari pendidikan sentralisasi ke paradigma pendidikan desentralisasi, sehingga menjadi pendidikan yang kaya dalam keberagaman, dengan titik berat pada peran masyarakat dan peserta didik.

Dalam proses pendidikan, perlu dilakukan kesetaraan perlakuan sektor pendidikan dengan sektor lain, pendidikan berorientasi rekonstruksi sosial, pendidikan dalam rangka pemberdayaan umat dan bangsa, pemberdayaan infrastruktur sosial untuk kemajuan pendidikan. Pembentukan kemandirian dan keberdayaan untuk mencapai keunggulan, penciptaan iklim yang kondusif untuk tumbuhnya toleransi dan konsensus dalam kemajemukan. Dari pandangan ini, berarti diperlukan perencanaan terpadu antarsektor dan antar jenjang (*bottom-up* dan *top-down planning*), pendidikan harus berorientasi pada peserta didik dan pendidikan harus bersifat multikultural serta pendidikan dengan perspektif global.

Rumusan paradigma pendidikan tersebut, paling tidak memberikan arah sesuai dengan arah pendidikan, yang secara makro dituntut menghantarkan masyarakat menuju masyarakat madani Indonesia yang demokratis, relegius, dan tangguh menghadapi lingkungan global. Maka dalam upaya pembaharuan pendidikan, perlu ada ikhtiar, yaitu strategi kebijakan perubahan diletakkan untuk menangkap kesempatan perubahan tersebut.

Jadi, pendidikan harus mengganti paradigma lama dengan paradigma baru, berorientasi pada masa depan, merintis kemajuan, berjiwa demokratis, bersifat desentralistik, berorientasi pada peserta didik, bersifat multikultural dan berorientasi pada perspektif global, sehingga terbentuk pendidikan yang berkualitas dalam menghadapi tantangan perubahan global menuju terbentuknya masyarakat madani Indonesia. Sebab pada tatanan konsep, pendidikan baik formal maupun non formal pada dasarnya memiliki peran penting melegitimasi bahkan melanggengkan sistem dan struktur sosial yang ada dan sebaliknya pendidikan merupakan proses perubahn sosial. Tetapi, peran pendidikan terhadap sistem dan struktur sosial tersebut, sangat bergantung pada paradigma pendidikan yang mendasarinya.

Kebijakan bidang pendidikan nasional harus terus diacu kepada prinsip-prinsip pertumbuhan, perubahan, pembaharuan dan kesinambungan. Pada era reformasi dan otonomi ini arah kebijaksanaan diacu kepada apa yang telah dirumuskan dalam GBHN 1999 dan Propenas 2000-2004, dengan penekanan pada peningkatan mutu yang dilandasi kekuatan akhlak dan budi serta pencapaian kecakapan untuk hidup yang meliputi kecakapan membaca dan menulis, kecakapan merumuskan dan memecahkan masalah, kecakapan menghitung tanpa alat bantu teknologi, kecakapan memanfaatkan teknologi, kecakapan bekerja sama dalam tim, kecakapan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya, kecakapan untuk terus menerus manjadi manusia belajar, kecakapan mengintegrasikan dengan etika sosio-religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Jelasnya menurut Malik Fadjar, dalam menghadapi era globalisasi, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, *pertama*, mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, *kedua*, mengantisipasi era global, *ketiga*, melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demoraktis, memerhatikan keragaman

kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan peran dan partisipasi masyarakat.

Menurut Malik Fajar, langkah yang telah ditempuhnya untuk memecahkan berbagai persoalan globalisasi yaitu; *Pertama*, pendidikan berbasis masyarakat luas (*board based education*) dengan orientasi kecakapan untuk hidup (*life skills*). *Kedua*, penerapan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*), melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola dan mengatur rumah tangga sekolah sendiri. *Ketiga*, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dengan pembentukan komite sekolah, dewan pendidikan dan standarisasi mutu. Kebijakan tersebut telah diperkokoh oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

SIMPULAN

Melihat beberapa pemikiran A. Malik Fajar dapat disimpulkan bahwa paradigma pemikiran pendidikan A. Malik Fajar dapat dikatakan bahwa paradigma pemikiran holistik, artinya mencakup semua aspek pendidikan yaitu pendidikan yang humanistik, liberatif, integralistik, multikultural. Untuk itu, dia mengembangkan beberapa hal mengenai prinsip strategis pengembangan pendidikan nasional yaitu; *Pertama*, orientasi pengembangan sumber daya manusia (SDM), *kedua*, ke arah pendidikan multikultural, dan *Ketiga*, spiritualitas watak kebangsaan sebagai pondasi dari bangunan kebangsaan adalah iman. Dari aspek kelembagaan pendidikan, beliau mengembangkan paradigma futuristik, yakni dengan menyiapkan lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam menjadi institusi yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan modernitas.

Dari segi manajemen, Malik Fajar mengembangkan paradigma desentralistik dengan melahirkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam menghadapi era globalisasi, menurut Malik Fajar, terdapat tiga tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, yaitu mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai, mengantisipasi era global, dan melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional. Untuk memecahkan masalah ini, Malik Fajar menawarkan beberapa solusi, yaitu; *Pertama*, pendidikan berbasis masyarakat luas (*board based education*) dengan orientasi kecakapan untuk hidup (*life skills*). *Kedua*, penerapan manajemen berbasis sekolah (*school-based*

management), melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan memiliki kemandirian dalam merencanakan, mengelola dan mengatur rumah tangga sekolah sendiri. *Ketiga*, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi dengan pembentukan komite sekolah, dewan pendidikan dan standarisasi mutu pendidikan. Kebijakan tersebut telah diperkokoh oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya media. 1992.
- Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Gramedia Indonesia. 1984.
- Danim, Sudarwan, *Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Fadjar, A. Malik, *Pengembangan Pendidikan Islam yang Menjanjikan Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Malang, 29 Juli 1995, (*tidak diterbitkan*).
- _____, "Menyiasati Kebutuhan Masyarakat Modern Terhadap Pendidikan Agama Luar Sekolah, Seminar dan Lokakarya Pengembangan Pendidikan Islam Menyongsong Abad 21", IAIN Cirebon, tanggal, 31 Agustus s/d 1 September 1995.
- _____, "Pengembangan Pendidikan Islam", dalam Nafis (Ed), *Konstekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof Dr. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: IPHI dan Paramadina. 1995.
- _____, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*. Jakarta: LP3NI, 1998.
- _____, et. el, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam. 1999.
- _____, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, cet I. Bandung: Mizan. 1999.
- _____, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Fajar Dunia. 1999.
- _____, *Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi*. Makalah Disampaikan sebagai Keynote Address dalam Seminar on Islam and The Challenges of Global Education in the New Millenium, The IIUM Alumni Chapter of Indonesia di Pekanbaru, tanggal 26 Januari 2003.
- _____, *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta; Raja Grafinda Persada, 2005.
- Hamidjojo, Santoso S. et al. *Platform Reformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Tim Kerja Peduli Reformasi Pendidikan Nasional. 1998.
- <http://edu-articles.com/menggugah-perspektif-masyarakat-terhadap-paradigma-baru-sistem-pendidikan-nasional/>

http://www.infogue.com/viewstory/2009/09/17/strategi_pendidikan_di_era_otonomi_dan_persaingan_global/?url=http://matematikadw.wordpress.com/2009/09/16/persoalan-pendidikan/

Latif, Abdullah, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, cet. Ke-2. Jakarta: Rafika Aditama, 2009.

Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Al Ma'arif. 1989.

Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2005.

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.

Nugroho, Heru (Ed.) *McDonaldisasi Pendidikan Tinggi. Center for Critical Social Studies*. Jakarta: Kanisius. 2002.

Pemerataan Pendidikan dalam <http://genenetto.getforum.org/forum/viewtopic.php?p=84>

Prasetyo, Hendro, Ali Munhanif dkk, *Islam dan Civil Society, Pandangan Muslim Indonesia*, Ce. Ke-I. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.

Purbo, Onno W., *Tantangan Bagi Pendidikan Indonesia*, From: [http:// www. detik. com/net/ onno/ jurnal/ 20004/ aplikasi/ pendidikan/p-19.shtml](http://www.detik.com/net/onno/jurnal/20004/aplikasi/pendidikan/p-19.shtml). 2000.

Said, Muhammad dan Juminar Affan, *Mendidik dari Zaman Ke Zaman*, Jakarta: Kalam Mulia, 1987

Tafsir, Ahmad, *Filsafat Pendidikan Islam, Integrasi Jasmani, Ruhani da Qalbu, Memanusiakan Manusia*, Cet. Ke-I. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, cet. I. Semarang: Aneka Ilmu. 2003.